

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, pendidikan menempati posisi yang sangat mulia karena kejahatan dan kedzaliman merupakan kegelapan, sedangkan ilmu dan pengetahuan adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh ilmu, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan arah hidup seseorang menuju masa depan yang lebih baik. Namun, ketika seseorang tidak memperoleh pendidikan yang layak, ia kehilangan bekal penting untuk menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan berperan penting bagi kemajuan sebuah peradaban, maka perlu adanya peran pihak yang mampu menjamin terselenggaranya pendidikan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memegang peranan sentral sebagai pengelola dan penentu arah kebijakan pendidikan nasional. Oleh karena itu, negara sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki kewajiban untuk menjamin pemerataan dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk “*mencerdaskan kehidupan bangsa.*” Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bukan hanya cita-cita moral, tetapi juga kewajiban konstitusional demi terwujudnya bangsa yang maju, berilmu, dan berintegritas.

Berdasarkan data statistik pendidikan Indonesia tahun 2025 (Hakim, Abdul & Nabila, 2025) tercatat sebanyak 79.578 peserta didik masih harus mengulang kelas dan 38.540 siswa putus sekolah. Kondisi ini menandakan perlunya pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional memiliki peran penting dalam menyediakan berbagai jalur dan layanan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Adapun pelaksanaan pendidikan di Indonesia dibagi menjadi tiga jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal di setiap jenjang dan jenisnya. Salah

satunya adalah Pendidikan nonformal, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 No.20 Tahun 2003 pasal 26, yang menyatakan bahwa Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan kecakapan hidup, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C, dan C kejuruan) serta pendidikan lain yang dirancang untuk meningkatkan kecakapan peserta didik.

Pendidikan nonformal berperan penting dalam memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal, sehingga mampu mendukung pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuk pendidikan nonformal yaitu program kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) yang diatur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur lembaga pendidikan nonformal untuk memastikan kualitas layanan, termasuk kurikulum, guru, sarana prasarana, pembiayaan dan evaluasi pembelajaran. Dalam konteks ini, program pendidikan kesetaraan menjadi alternatif strategis dalam mewujudkan pendidikan untuk semua (*education for all*), terutama bagi masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Namun pelaksanaan pendidikan nonformal tentu tidak lepas dari tantangan, terutama dalam aspek pengelolaan pelaksanaan programnya. Setiap lembaga pendidikan memiliki sistem pengelolaan yang khas, sebab cara suatu program dikelola menjadi faktor penentu keberhasilannya. Efektivitas pelaksanaan program sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengelola seluruh komponen pendidikan secara terpadu, mulai dari sumber daya manusia, kurikulum hingga dukungan masyarakat.

Fenomena pengelolaan pendidikan di Indonesia masih menunjukkan beragam tantangan, terutama dalam hal pemerataan mutu, efektivitas manajemen lembaga, dan daya dukung sumber daya manusia. Kemendikbudristek (2024) menyebutkan bahwa ketimpangan mutu pendidikan antarwilayah masih tinggi, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, pada hasil evaluasi Akreditasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 oleh BAN PAUD dan PNF menunjukkan bahwa 57,9%

lembaga pendidikan nonformal dan PAUD di Jawa Barat telah memenuhi standar akreditasi (A, B, atau C), namun 42,1% lembaga lainnya belum terakreditasi atau belum memenuhi standar mutu BAN PAUD dan PNF terutama dalam aspek perencanaan program, pelaksanaan pembelajaran, serta monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, upaya memperkuat pengelolaan lembaga pendidikan nonformal menjadi aspek penting dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan nasional.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang secara konsisten aktif mendorong peningkatan akses dan mutu pendidikan, termasuk jalur pendidikan nonformal. Dinas Pendidikan Ciamis memiliki Bidang yang berfokus pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang bertugas mengkoordinasikan berbagai layanan pendidikan masyarakat, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), program kesetaraan (Paket A, B, C), dan kursus keterampilan. Di wilayah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, terdapat lembaga yang secara spesifik mengintegrasikan pendidikan berbasis Al-Qur'an dengan pendidikan umum yaitu *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani Ciamis, yang berada dibawah naungan Yayasan Bina Insani. Lembaga ini menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket A dengan pendekatan berbasis nilai-nilai islam. Meskipun menggunakan nama '*Homeschooling*,' penamaannya lebih merujuk pada fleksibilitas waktu dan individualisasi pembelajaran yang merupakan ciri khas pendidikan nonformal, bukan pada model pembelajaran di rumah secara konvensional. Keunikan lembaga ini terletak pada lingkungan belajar alternatif yang dimilikinya, yakni menggunakan fasilitas berupa bangunan gazebo-gazebo *outdoor* yang digunakan sebagai ruang kelas belajar, dengan berbagai program unggulan didalamnya yaitu berenang, memanah, *outing class*, *life skill* dan Daurah Qur'an.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan bersama beberapa narasumber antara lain, kepala sekolah, pendidik dan Staf Tata Usaha di *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani Ciamis, dijelaskan bahwa pengelolaan Program Paket A pada Pendidikan Kesetaraan di lembaga ini masih menghadapi

berbagai tantangan dalam menjalankan program tersebut. Beberapa masalahnya antara lain, keterbatasan sumber daya manusia pada aspek kompetensi dan pengembangan profesional pendidik, sebagian guru merasa belum sepenuhnya kompeten dalam bidang tertentu yang diajarkan. Disisi lain, terdapat tenaga kependidikan yang merangkap tugas, sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kondisi ruang belajar yang terbatas, belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai turut memengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran. Sumber pendanaan yang minim dan tidak stabil, Selain itu, pengelolaan dua satuan pendidikan di bawah naungan yayasan juga menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam pembagian sumber daya dan perhatian terhadap masing-masing program.

Penelitian terdahulu juga mengungkapkan hal serupa. Susanti, Setiawan, Aprilia, Afriza, Ihsan, dan Patunnisa (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “*Tantangan dan Peluang Manajemen Pelatihan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Medan*” menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan nonformal, khususnya pada lembaga SKB, menghadapi berbagai kendala dalam aspek manajemen pelatihan. Tantangan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya fasilitas pendukung, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program pelatihan yang diselenggarakan. Rendahnya insentif bagi tenaga pendidik juga memengaruhi motivasi dan efektivitas pelaksanaan program. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa kualitas manajemen pelatihan memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kompetensi pendidik dan efektivitas pembelajaran. SKB yang menerapkan fungsi manajemen secara efektif melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan yang interaktif, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan daya saing peserta didik di dunia kerja.

Berdasarkan penelitian terdahulu banyak penelitian dilakukan dengan berfokus pada konteks lembaga PKBM atau SKB, serta pada program pelatihan umum atau kesetaraan tingkat Paket B dan C, sementara kajian mengenai pengelolaan

Program kesetaraan Paket A pada lembaga nonformal masih sangat terbatas. Disamping itu, lembaga seperti *Homeschooling Al-Qur'an Bina Insani Ciamis* memiliki karakteristik unik, baik dari program unggulannya, maupun nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam kegiatan belajar. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian pada kajian program kesetaraan paket A, maka dari itu peneliti mengambil topik ini untuk menambah kajian penelitian terkait bagaimana pengelolaan diterapkan dalam lembaga pendidikan kesetaraan Program Paket A di lembaga *homeschooling* berbasis Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengelolaan pendidikan nonformal, serta kontribusi praktis bagi pengelola lembaga dalam meningkatkan efektivitas program kesetaraan melalui penerapan fungsi-fungsi pengelolaan yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi pengelolaan Program Paket A di *Homeschooling Al-Qur'an Bina Insani Ciamis* yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengelolaan Program Paket A Pendidikan Kesetaraan di *Homeschooling Al-Qur'an Bina Insani Ciamis*?”

1.3 Definisi Operasional

1.3.1 Pengelolaan Program Paket A

Pengelolaan program diartikan sebagai serangkaian proses sistematis yang dilakukan untuk mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan agar tujuan program dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pengelolaan program pendidikan nonformal memerlukan pedoman dan ukuran tertentu agar kualitasnya dapat memenuhi standar akreditasi. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Pengelolaan Program Paket A adalah proses pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di *Homeschooling Al-Qur'an Bina Insani Ciamis* yang mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar tujuan pendidikan kesetaraan tercapai secara efektif. Standar

mutu yang digunakan berpedoman pada PP No. 4 Tahun 2022, namun disesuaikan dengan kondisi nyata lembaga.

1.3.2 Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah salah satu jenis pendidikan nonformal yang memberikan pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan formal. Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA, dengan fokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap dan kepribadian siswa. Pemerintah dan masyarakat melalui berbagai lembaga seperti PKBM, SKB, dan pondok pesantren menyelenggarakannya. Program ini dimaksudkan untuk membantu sebanyak mungkin orang yang karena kondisi tertentu tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Dalam konteks penelitian ini, Pendidikan Kesetaraan di Homeschooling Al-Qur'an Bina Insani Ciamis diimplementasikan melalui Program Paket A yang dirancang untuk memberikan layanan belajar setara dengan jenjang SD bagi anak-anak dan remaja yang memilih jalur pendidikan nonformal berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Program ini tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter religius dan kemandirian belajar sesuai dengan visi lembaga.

1.3.3 *Homeschooling*

Homeschooling adalah sebuah model pendidikan alternatif yang didominasi oleh peran sentral orang tua sebagai pendidik utama yang bertanggung jawab langsung untuk merancang dan melaksanakan kurikulum di lingkungan berbasis rumah, meskipun dapat diperkaya dengan sumber daya komunitas. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan materi, metode (seperti proyek dan eksperimen interaktif), dan durasi belajar sesuai dengan minat, gaya belajar, dan kebutuhan unik anak, yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan daya nalar kritis. Dalam penelitian ini, *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani Ciamis merupakan lembaga penyelenggara pendidikan berbasis rumah yang mengintegrasikan sistem *homeschooling* dengan program kesetaraan Paket A. Lembaga ini menekankan pembelajaran berorientasi Qur'ani, pembiasaan karakter islami, dan pendekatan personal terhadap peserta didik. Dengan demikian, *homeschooling* di lembaga ini berfungsi sebagai wadah pendidikan nonformal yang

tidak hanya mengejar kesetaraan akademik, tetapi juga menumbuhkan nilai spiritual dan sosial peserta didik.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengelolaan Program Paket A Pendidikan Kesetaraan di *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani Ciamis.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi kajian ilmiah terhadap pengembangan kajian pengelolaan program pendidikan nonformal, khususnya program Pendidikan kesetaraan paket A.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti dalam memahami konsep serta penerapan pengelolaan program pendidikan nonformal, khususnya pada Program Paket A berbasis *Homeschooling* Qur'ani. Mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan dalam perkuliahan dalam bidang pengelolaan atau manajemen program.

1.5.2.2 Bagi *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani atau Lembaga yang sejenis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta gambaran nyata mengenai pengelolaan Program Paket A, sehingga dapat dijadikan dasar dalam upaya perbaikan dan pengembangan program pendidikan kesetaraan, baik di *Homeschooling* Al-Qur'an Bina Insani maupun di lembaga sejenis yang berbasis nilai-nilai Al-Qur'an. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam merancang strategi manajerial yang lebih sistematis, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

1.5.2.3 Bagi Pengelola Program Paket A

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris dan rekomendasi mengenai penerapan fungsi-fungsi pengelolaan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan) dalam pengelolaan Program Paket A. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan program, kinerja tutor, serta efektivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan kesetaraan yang lebih optimal.